



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Juni 2021

Halaman: 9

Segera Selesaikan Tindakan yang Mencoreng Pariwisata DIY

TAJUK

Citra pariwisata DIY kembali tercoreng. Kasus tarif melebihi batas menimpa wisatawan yang berkunjung ke sejumlah objek wisata.

Tak hanya soal harga makanan, tarif parkir juga dikeluhkan wisatawan. Keluhan tarif parkir terjadi di dua tempat di Kota Jogja, yakni di sekitar GL Zoo dan Jalan Ahmad Dahlan.

Kemudian keluhan soal *nuthuk* harga atau harga yang dipatok terlalu tinggi terjadi di pedagang kaki lima (PKL) Jalan Perwakilan, Jogja.

Adapun di Kabupaten Sleman, wisatawan mengeluhkan soal tidak diperbolehkannya naik langsung ke petilasan Mbah Maridjan.

Nuthuk harga makanan maupun tarif parkir bukan kali pertama kali ini saja terjadi di Kota Jogja. Pemkot Jogja sudah menyelesaikannya dengan pendekatan kepada pedagang, memberi pengertian dan menutup sementara. Merangkul paguyuban di sekitar Malioboro. Cara ini tentu saja patut diapresiasi. Meskipun kasus tersebut muncul

lagi. Dengan adanya kondisi tersebut kebijakan Pemkot tersebut harus ada evaluasi berkala agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Perkara *nuthuk* tarif juga terjadi di Jalan Ahmad Dahlan, yaitu parkir mahal hingga Rp20.000. Kejadian ini viral dan kebetulan berdekatan jarak waktu dengan peristiwa *nuthuk* harga makanan yang viral. Dua hal ini tentu mencoreng citra pariwisata Jogja. Selama ini banyak yang mengenal Jogja dihuni masyarakat ramah,

dengan harga makanan yang murah. Namun faktanya lain.

Pemkot Jogja harus berusaha menyelesaikannya dengan baik. Tidak saling lempar tanggung jawab. Perkara maraknya parkir ilegal juga harus dirampungkan, bukan saling tunjuk tanggung jawab siapa. Dua hal ini tidak bisa dianggap remeh jika ingin memperbaiki dan menampilkan citra pariwisata Jogja yang ramah. Harus ada sistem evaluasi berkala yang diterapkan.

Demikian soal kasus di lereng Merapi, Pemkab Sleman harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rentetan kejadian soal pelayanan dan hal-hal negatif di dunia pariwisata DIY baru-baru ini sebenarnya bukan persoalan baru. Insiden itu sebenarnya merupakan problem lama. Pemegang otoritas mesti mengambil strategi dan tidak menganggap sepele persoalan itu.

Persoalan yang diprotes wisatawan itu merupakan hal teknis yang kadang dianggap tidak terlalu

penting oleh pengelola dan otoritas pariwisata. Padahal, hal-hal teknis semacam itu merupakan bagian yang perlu diperhatikan sedetail mungkin agar tidak berbuntut negatif.

Apalagi saat ini wisatawan bisa dengan mudah mengumbar keluhan di media sosial. Akibatnya citra buruk wisata di DIY bisa cepat tersebar hingga seluruh Indonesia maupun dunia internasional. Jika ini tidak segera diselesaikan tentunya akan berdampak negatif pada dunia pariwisata di DIY.

anjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005